

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut, dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019
PROGRAM PRIORITAS C. INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA KELAUTAN SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT

Sasaran Utama:											
1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan rumput laut masing-masing menjadi sebesar 6,98 juta ton dan 19,54 juta ton											
2. Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan menjadi 20 juta ha											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
C.1 PERIKANAN											
1.	Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, dan Penguatan Mutu Produk Perikanan mulai dari Proses Pra-produksi, Produksi, Pengolahan, sampai dengan Pemasaran	Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	Produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya	Melaksanakan forum dagang	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	Kemendag	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Pengembangan produk ekspor	Produk potensial ekspor	1. Melaksanakan identifikasi produk 2. Melaksanakan pengembangan produk ekspor 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi	55 produk	56 produk	60 produk	60 produk	Kemendag	KKP, Kemenperin	APBN
		Pengembangan pasar dan informasi	Informasi pasar ekspor	1. Melaksanakan penyusunan data	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	Kemendag	KKP, Badan Pusat Statistik	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		ekspor		dan informasi pasar ekspor 2. Melaksanakan penyebaran informasi pasar ekspor						(BPS)	
		Produksi dan usaha pembudidayaan ikan	Sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik unit budi daya udang	2.013 unit budi daya udang bersertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (kumulatif)	-	1.139	1.664	2.013	KKP		APBN
		Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	Produksi dan kualitas garam yang meningkat	Produksi garam pada tahun 2019 sebesar 3,6 juta ton dengan kualitas sebesar 70%	3 juta ton; 50% kualitas	3,2 juta ton; 60% kualitas	3,4 juta ton; 65% kualitas	3,6 juta ton; 70% kualitas	KKP	Kemenperin Kemendag, BMKG, BPS, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal	Kapal perikanan yang terbangun	10.664 unit kapal	1.719	2.500	3.275	3.170	KKP	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), Kemenperin	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		perikanan								Kemenuh, Pemda	
		Pengelolaan pelabuhan perikanan	Tersedianya pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	90 pelabuhan perikanan (kumulatif)	75	80	85	90	KKP	Kemenuh, BUMN, Pemda	APBN, APBD, BUMN
			Operasional pelabuhan perikanan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pusat	24 pelabuhan perikanan (kumulatif)	22	22	23	24	KKP	Kemenuh, BUMN, Pemda	APBN, APBD, BUMN
		Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Kawasan kebun bibit rumput laut yang dibangun	340 kebun bibit rumput laut (kumulatif)	300	330	335	340	KKP	Kemenuhin	APBN
		Bina mutu dan diversifikasi produk perikanan	Ragam produk olahan bernilai tambah	60 ragam produk olahan (kumulatif)	40	45	50	60	KKP	Kemenuhin Kemendag	APBN
			Utilitas Unit Pengolah Ikan (UPI)	85% utilitas Unit Pengolah Ikan (UPI) (kumulatif)	81%	82%	83%	85%	KKP	Kemenuhin	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
2.	Peningkatan Pengolahan, Pemasaran, Nilai Tam-bah, serta Standar Keselamatan Produk Kelautan dan Perikan-an	Pembinaan dan penerapan sistem perkarantina-an dan ke-amanan hayati ikan	Penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI	Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI	80%	88%	92%	96%	KKP		APBN
			Peta sebaran penyakit ikan karantina	Lokasi yang dipetakan dari penyakit ikan karantina	339	342	368	460	KKP		APBN
			Sertifikasi kesehatan ikan yang memenuhi standar	Jumlah sertifi-kat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar	32.500	33.500	34.500	35.500	KKP		APBN
		Sistem jamin-an mutu dan keamanan hasil perikan-an	Produk per-ikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persya-ratan mutu dan keamanan hasil perikan-an	Persentase produk per-ikanan yang masuk ke dalam wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan aman dikon-sumsi	73%	77%	79%	80%	KKP	Kemendag	APBN
			Sertifikasi mutu produk perikanan	Jumlah sertifikat mutu produk ekspor	82.000	84.000	86.000	87.000	KKP	Kemendag	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (<i>Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP</i>) pada Unit Pengolahan Ikan	Sertifikat pe-nerapan sis-tem jaminan mutu (HACCP)	1.300	1.325	1.355	1.395	KKP		APBN
		Pengendalian sistem pengaran-tinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Pengendalian dan pengawas-an sistem pe-ngarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hayati ikan	Layanan dan pengawasan di <i>exit/entry point</i> perbatas-an	73 %	76%	81%	87%	KKP		APBN
		Penumbuhan dan pengem-bangan indus-tri makanan, hasil laut, dan perikanan	Terbangunnya industri penun-jang dan indus-tri pengolahan hasil laut dan perikanan	1 dokumen <i>Feasibility Study</i> dan <i>Detailed Engineering Design</i>	-	1	-	-	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD
				1 unit pembe-kuan ikan dan 3 pabrik es	1 unit pembe-kuan ikan di Maluku	1 unit pabrik es	2 unit pabrik es	-	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Terbangunnya industri peng-olahan rumput laut berbasis <i>Alkali Treated Gracilaria</i> (ATG) dengan kapasitas 3.200 ton di Kabupaten Bo-ne, Sulawesi Selatan	1 dokumen <i>Feasibility Study</i> dan <i>Detailed Engineering Design</i>	1	-	-	-	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD
				Industri pengolahan rumput laut dengan kapa-sitas 3.200 ton (kumulatif)	-	400 ton	1.200 ton	1.600 ton	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD
			Terbangunnya industri cang-kang kapsul dengan kapa-sitas 250 ribu cangkang kap-sul	1 unit <i>pilot project</i> indus-tri cangkang kapsul	-	-	1 unit	-	Kemenperin	KKP, Kemen-ristekdikti, BPPT, Perguruan Tinggi	APBN
3.	Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Perikanan secara Lestari	Pengendalian penangkapan ikan	Tersedianya data perizinan kapal perikan-an pusat-daerah yang terintegrasi	34 provinsi (kumulatif)	16	20	25	34	KKP	Kemenhub, Pemda	APBN, APBD
		Penelitian dan pengem-bangan iptek perikanan	Terkajinya stok ikan (<i>stock assess-ment</i>)	Kajian stok ikan pada 11 Wilayah Pengelolaan	7	11	11	11	KKP	LIPi, BPPT, Perguruan Tinggi	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Perikanan (WPP)							
		Pengelolaan sumber daya ikan	Laut teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya	11 WPP (kumulatif)	7	9	10	11	KKP	Pemda	APBN, APBD
			Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dikelola sumber daya ikannya	7 WPP (kumulatif)	4	4	7	7	KKP	Pemda	APBN, APBD
			Perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya, termasuk alokasi izin usaha penangkapan	11 WPP	11	11	11	11	KKP	Pemda	APBN, APBD
			Kapal perikanan yang menerapkan <i>logbook</i> penangkapan ikan	1.250 unit kapal (kumulatif)	500	750	1.000	1.250	KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
C.2 PERTAMBANGAN LEPAS PANTAI DAN ENERGI LAUT											
1.	Pengembangan dan Pe-manfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai de-ngan Prinsip Ekonomi Bi-ru dengan Memperhati-kan Tekno-logi Ramah Lingkungan	Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Arus Laut	Terlaksananya pembangunan PLT Arus Laut	1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (2017) sebesar 10 KW	-	1 unit	-	-	Kemen-ESDM	KKP, Kemen-PUPR, BPPT, Pemda, Perguruan Tinggi	APBN, APBD
		Pembangun-an Pembang-kit Listrik aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di wilayah perbatasan dan pulau terluar	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Jumlah PLT aneka EBT yang dibangun	100 unit	128 unit	128 unit	128 unit	Kemen-ESDM	Kemenhan, BNPP, Pemda	APBN, APBD
		Persiapan <i>Product Sharing Contract</i> (PSC) Blok East Natuna	Meningkatnya produksi minyak dan gas (migas) nasional	Dokumen studi <i>Technology Market Review</i> (TMR) untuk lapangan gas (2017); persiapan PSC (2018)	Pemba-hasan dan pe-nyusunan TMR untuk lapang-an gas (AL) per-tengah-an tahun	-	-	-	Kemen-ESDM	Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
					tangan PSC	2017					
		Pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela	Meningkatnya produksi migas nasional	Persiapan produksi pada lapangan abadi wilayah kerja Masela	Keputusan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela dengan skema on-shore (darat)	Revisi Plan of Development (POD)	Front End Engineering Design (FEED) dan tender	Final investment decision	Kemen-ESDM	SKK Migas, BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, Joint Venture
		Perpanjangan wilayah kerja Mahakam	Meningkatnya produksi migas nasional	Persiapan produksi migas wilayah kerja Mahakam	Persiapan alih kelola dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	-	-	-	Kemen-ESDM	SKK Migas, BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, Joint Venture
		Indonesian Deep Water Development (IDD) Bangka	Meningkatnya produksi migas nasional	IDD Bangka: 110 MMSCFD (2016-2017)	On-stream (produksi) 450 mmscfd 200	-	-	-	Kemen-ESDM	SKK Migas, Pemda, Swasta	APBN, APBD Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
					bopd						
		Pengembangan lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East (Jangkrik Complex) wilayah kerja Muara Bakau	Meningkatnya produksi migas nasional	Produksi migas wilayah kerja Muara Bakau	Pembangunan fasilitas produksi	On-stream (produksi)	-	-	Kemen-ESDM	SKK Migas, Pemda, Swasta	APBN, APBD Swasta, Joint Venture
		Fasilitasi konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bagi kapal perikanan	Terlaksananya konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi kapal perikanan yang dilaksanakan	Pemberian paket BBG (Liquefied Petroleum Gas) untuk kapal perikanan paket sebesar 68.000 paket	38.000	10.000	10.000	10.000	Kemen-ESDM	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Penyediaan infrastruktur dasar ketenagalistrikan di pulau-pulau kecil	Pembangunan jaringan transmisi bawah laut untuk mendistribusikan listrik ke pulau-pulau kecil						Kemen-ESDM	Kemendagri, Kemenper, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-	APBN, BUMN, Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										PDTT), BUMN, Swasta	
		Peningkatan kapasitas produksi migas nasional	Peningkatan produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional	1. Produksi minyak bumi : 700 ribu barrel per hari 2. Produksi gas bumi : 1.295 ribu <i>barrel oil equivalent per day</i>	880 1.150	790 1.150	715 1.200	715 1.295	Kemen-ESDM, BUMN	Kemenperin, SKK Migas, Pelaku Industri (K-3-S), BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>
			Meningkatkan kapasitas untuk mendukung ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia	Pembangunan Kilang • PLBC RU-IV Cilacap 2018 • RDMP RU-V Balikpapan 2019 • GRR West 1 (Tuban) 2021 • RDMP RU-IV Cilacap 2022 • RDMP RU-II	-	-	PLBC RU-IV Cilacap 2018	RDMP RU-V Balikpapan 2019	BUMN	Kemen-ESDM, Kemenperin, Pemda	APBN, APBD, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Dumai, RDMP RU-VI Balongan, GRR East 1 (Bontang) 2023 • GRR West 2 dan East 2 (2025-2030)							
			Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional	<i>Roadmap</i> Infrastruktur Gas Bumi Indonesia	1 Mini LNG Plant	1 <i>Floating Storage Re-gasification Unit</i> (FSRU)	1 Mini LNG Plant 1 LNG Terminal	1 <i>Floating Storage Re-gasification Unit</i> 2 LNG Terminal	Kemen-ESDM	Kemen-BUMN, Pemda	APBN, APBD
			Meningkatkan cadangan dan potensi migas nasional melalui peningkatan kegiatan eksplorasi	Meningkatnya jumlah potensi dan cadangan migas nasional	Meningkatkan kegiatan eksplorasi melalui kemudahan-	Cadangan minyak bumi sebesar 6.285 MMSTB	-	-	Kemen-ESDM	Bappenas, Kemenperin, SKK Migas, BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				an akses data melalui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 / 2006		an gas bumi se- besar 145 TSCF (RKPF 2017)					
		Peningkatan nilai tambah industri mi- neral dan ba- tubara yang berkelanjutan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang bernilai tam- bah melalui pembangunan fasilitas peng- olahan dan pe- murnian di da- lam negeri	Terbangunnya pelabuhan pengangkutan khusus	v	v	v	v	Kemen- ESDM	Kemenperin, BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Pengelolaan pertambangan skala kecil yang bertanggung jawab	Pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI)	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	Kemen- ESDM	Kemen-LHK, Kemendagri Kemenperin, Kementeri- an Kesehat- an (Kemen- kes), Polri	APBN
				Penelitian kondisi ling- kungan wila- yah pesisir dan lepas pan- tai Sumbawa bagian selatan sebagai wila- yah sektor pertambangan strategis	-	1 lokasi	-	-	Kemen- ESDM	Kemen-LHK	APBN
			Peningkatan jumlah cadang- an batubara untuk kebu- tuhan sektor pembangkit	Terbangunnya depo batubara di lokasi- lokasi tertentu	v	v	v	v	Kemen- ESDM	Kemenperin, BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, Joint Venture
		Peningkatan data dan informasi	Terlaksananya survei Seismik 2D/3D kerja	2 wilayah di cekungan Flores dan	-	2 wilayah	-	-	Kemen- ESDM	Kemenko Maritim, TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		potensi migas di Kawasan Indonesia Timur	sama antara Kementerian ESDM dengan TNI	cekungan Bali-Lombok							
		Penelitian dan Pengembangan Potensi Energi Laut	Peningkatan potensi energi laut yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar	Penelitian Potensi <i>Ocean Thermal Energy Conversion</i> (OTEC)	-	1 wilayah (Pulau Morotai)	-	-	Kemen-ESDM	KKP, BPPT	APBN
C.3 WISATA BAHARI											
1.	Pengembang-an Pariwisata Bahari Berkelanjutan dengan Memperhati-kan Kepen-tingan Ma-syarakat Lokal, Kearifan Tradisional, Kawas-an Konser-vasi Perairan, dan Kelestarian	Penataan dan pengelolaan jasa kelautan	Kawasan yang dibangun/ dikembangkan sarana prasarana (sarpras) untuk wisata bahari	12 kabupaten/ kota	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	KKP	Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi	Kawasan konser-vasi yang dimanfaatkan	Kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya peman-faatannya untuk pening-	20	20	25	30	KKP	Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda	APBN dan Coremap-CTI, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Lingkungan	perairan daerah		katan penda-patan masya-rakat							
		Konservasi sumber daya alam hayati	Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut nontaman nasional	Jumlah unit kawasan konservasi nontaman nasional yang siap dikun-jungi dengan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	-	18 unit kawasan kon-servasi	18 unit kawasan kon-servasi	18 unit kawasan kon-servasi	Kemen-LHK	Kemenko Maritim, KKP, Kemendagri	APBN
		Pengelolaan taman nasional	Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasio-nal laut	Jumlah unit kawasan ta-man nasional yang siap di-kunjungi de-ngan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	-	15 taman nasional	15 taman nasional	15 taman nasional	Kemen-LHK	Kemenko Maritim, KKP, Kemendagri	APBN
		Fasilitasi penerapan		Lokasi destinasi	10	10	10	10	Kemenpar	KKP, Kemen-	APBN,

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		<i>sustainable tourism development</i>		prioritas						PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda	APBD
		Fasilitasi dukungan pengembangan infrastruktur pariwisata		Lokasi destinasi prioritas	10	10	10	10	Kemenpar	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD
2.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk Pariwisata Bahari secara Berkelanjutan bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat di destinasi pariwisata termasuk kawasan perbatasan dan pulau kecil		Jumlah daerah yang difasilitasi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	Kemenpar	Pemda	APBN, APBD
		Bimbingan teknis sadar wisata dan potensi masyarakat		Jumlah daerah yang difasilitasi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	Kemenpar	Pemda	APBN, APBD
		Pengembangan segmen pasar perso-	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah promosi wisata	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	Kemenpar	Kemenko Maritim	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		nal	segmen pasar personal	bahari							
		Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata alam dan buatan di destinasi pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata bahari dengan kriteria: 1) wisata pantai; 2) wisata bentang laut; dan 3) wisata bawah laut	25 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN	10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN	10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN	Kemenpar	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD
C.4 PEMANFAATAN SDA NONKONVENSIONAL DAN SD PESISIR BERKELANJUTAN											
1.	Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Daya Alam Non-konvensional Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan	Penawaran wilayah kerja migas non-konvensional	Percepatan pengembangan migas non-konvensional	4 wilayah kerja (2017)	-	4	-	-	Kemen-ESDM		APBN
		Pengembangan lokasi destinasi wisata prioritas nasional <i>Wonderful Indonesia</i>	Tersedianya informasi lokasi keragaman warisan dan perlindungan geologi	7 lokasi prioritas (5 lokasi berada di wilayah pesisir)	-	Toba; Kep. Seribu; Tg. Kelayang; Tg. Lesung; Bromo-Tengger-	-	-	Kemen-ESDM	Kemenko Maritim, Kemenpar, Bappenas, Kemen-PUPR, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
						Semeru; Mandali-ka; Labuan Bajo					
2.	Pengembang-an Industri Bioteknologi Kelautan dan Biofarmakologi Laut dengan Pemanfaatan Potensi Keanekar-gaman Hayati	Penelitian dan pengem-bangan teknologi industri agro	Berkembang-nya teknologi dan/atau produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	2 hasil riset teknologi dan/atau produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	-	-	1 hasil riset	1 hasil riset	Kemenperin	KKP, BPPT	APBN
		Penumbuhan dan pengem-bangan in-dustri kimia hilir	Tersusunnya profil investasi hasil laut dan perikanan untuk industri kosmetik dan farmasi	Profil investasi hasil laut dan perikanan untuk industri kosmetik dan farmasi	-	-	2 profil	3 profil	Kemenperin	KKP, BKPM, Penda	APBN, APBD
			Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri terkait cara produksi obat yang baik dan	Bimbingan teknis cara produksi obat yang baik dan bimbingan teknis cara produksi kosmetik yang	-	40 orang	200 orang	400 orang	Kemenperin	Kemenkes, BPOM	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			bimbingan teknis cara produksi kosmetik yang baik berbasis hasil laut dan perikanan	baik berbasis hasil laut dan perikanan bagi 640 orang SDM industri							
			Tersusunnya rancangan standar produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	12 rancangan standar produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	-	2 Rancang-an Stan-dar Nasio-nal Indo-nesia (RSNI)	4 RSNI	6 RSNI	Kemenperin	Badan Standardi-sasi Nasional (BSN), BPOM	APBN
			Tersusunnya rancangan standar kompetensi industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	6 rancangan standar kompetensi industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	-	1 Rancang-an Stan-dar Kom-petensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)	2 RSKKNI	3 RSKKNI	Kemenperin	Kemnaker, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), BPOM	APBN
			Berkembang-nya brand produk industri	15 produk industri farmasi dan kosmetik	-	3 produk	5 produk	7 produk	Kemenperin	Kemendag, BPOM	APBN